



Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia

**Diskusi Panel Sespimti
15 Juni 2021**

Wahyudi Kumorotomo (Prof. Dr.,MPP)

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

What is Public Policy?

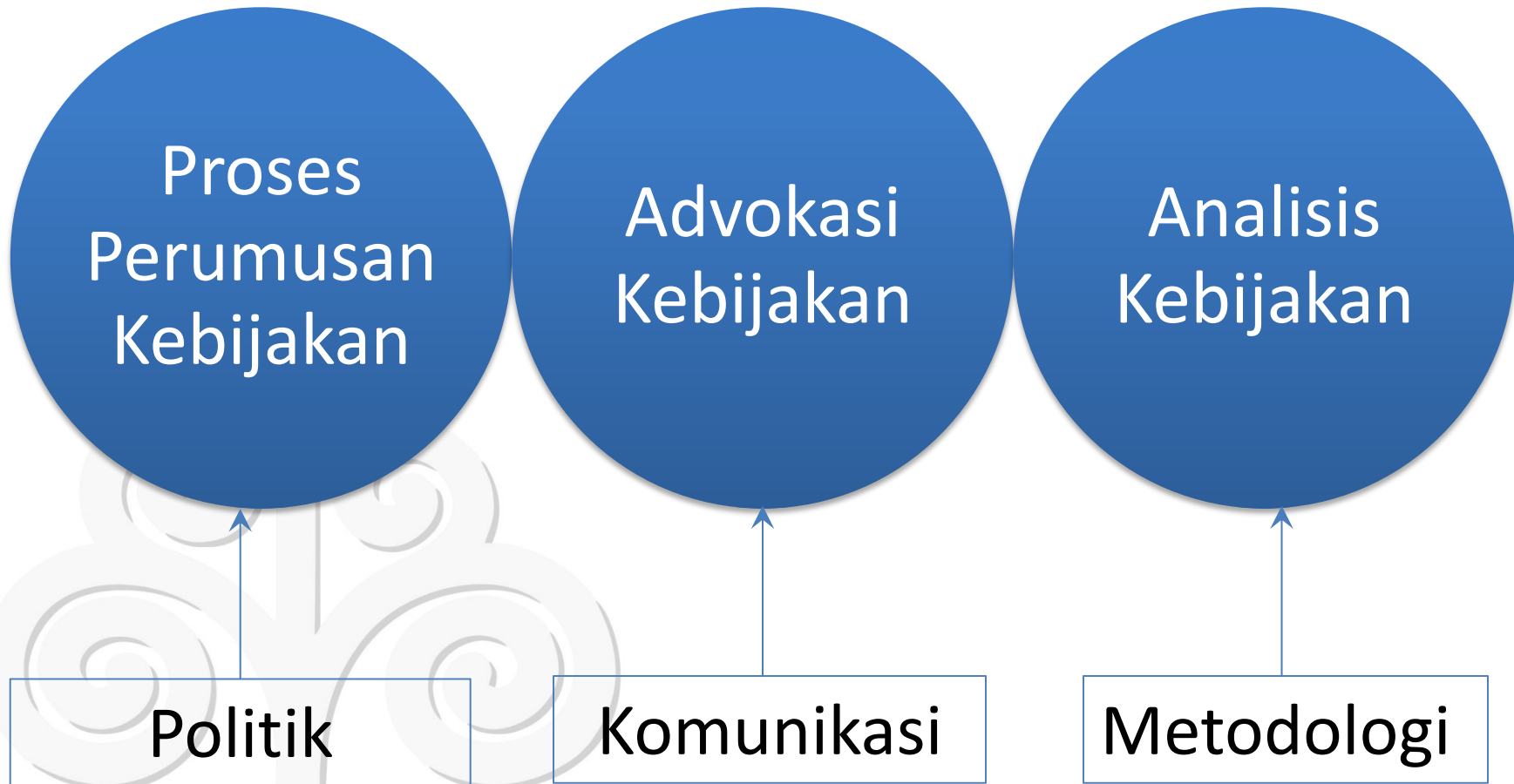
- ✿ Carl Friedrich (1967): “ a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose”.
- ✿ Guy Peters (1996): “ the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as those actions have an influence on the lives of citizens”
- ✿ Thomas Dye (1981): “public policy is whatever governments choose to do or not to do”.

Ciri Pokok Kebijakan Publik

1. Mempengaruhi kepentingan banyak pihak atau kelompok dalam suatu negara
2. Karena perbedaan kepentingan, kebijakan publik pasti menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok yang lain
3. Rumusan kebijakan merupakan kompromi sementara berdasarkan kesepakatan antar aktor atau antar kelompok
4. Perubahan kebijakan ditentukan oleh: 1) bagaimana aktor melihat kepentingan terkait dengan kebijakan, 2) kondisi yang dihadapi masing-masing aktor, dan 3) persepsi tentang peluang baru bagi adanya perubahan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik.

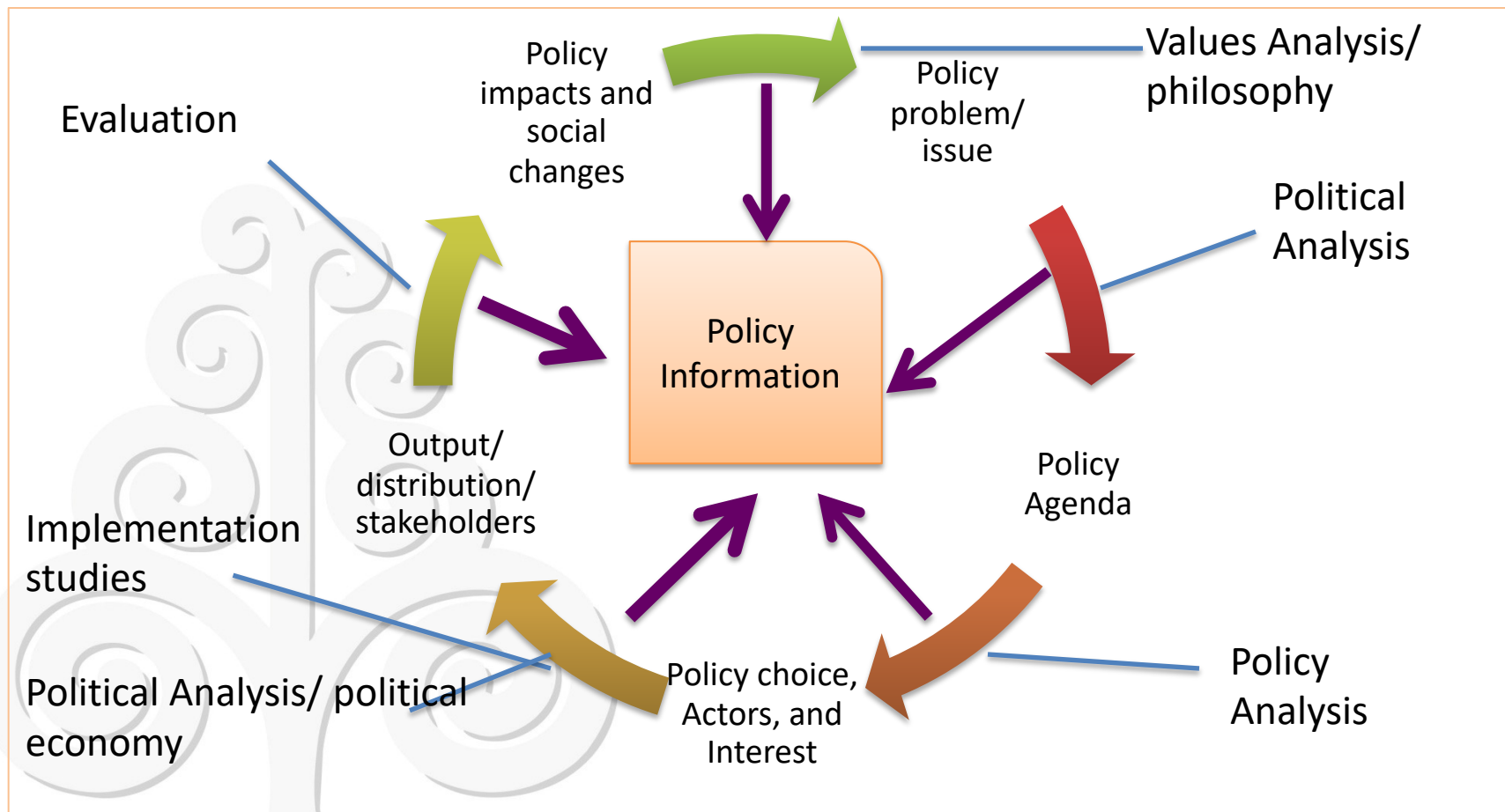


Tiga Lingkup Studi Kebijakan

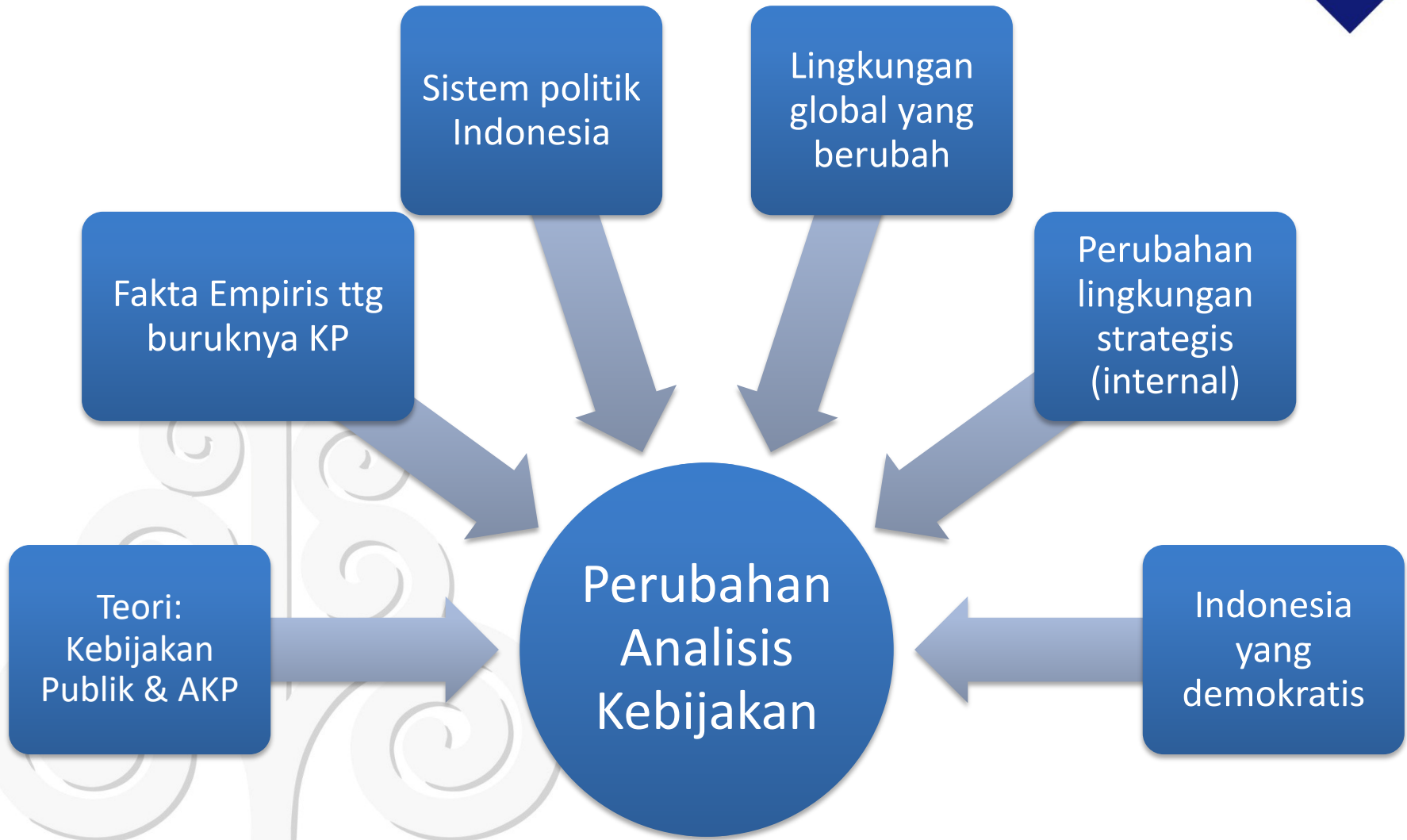


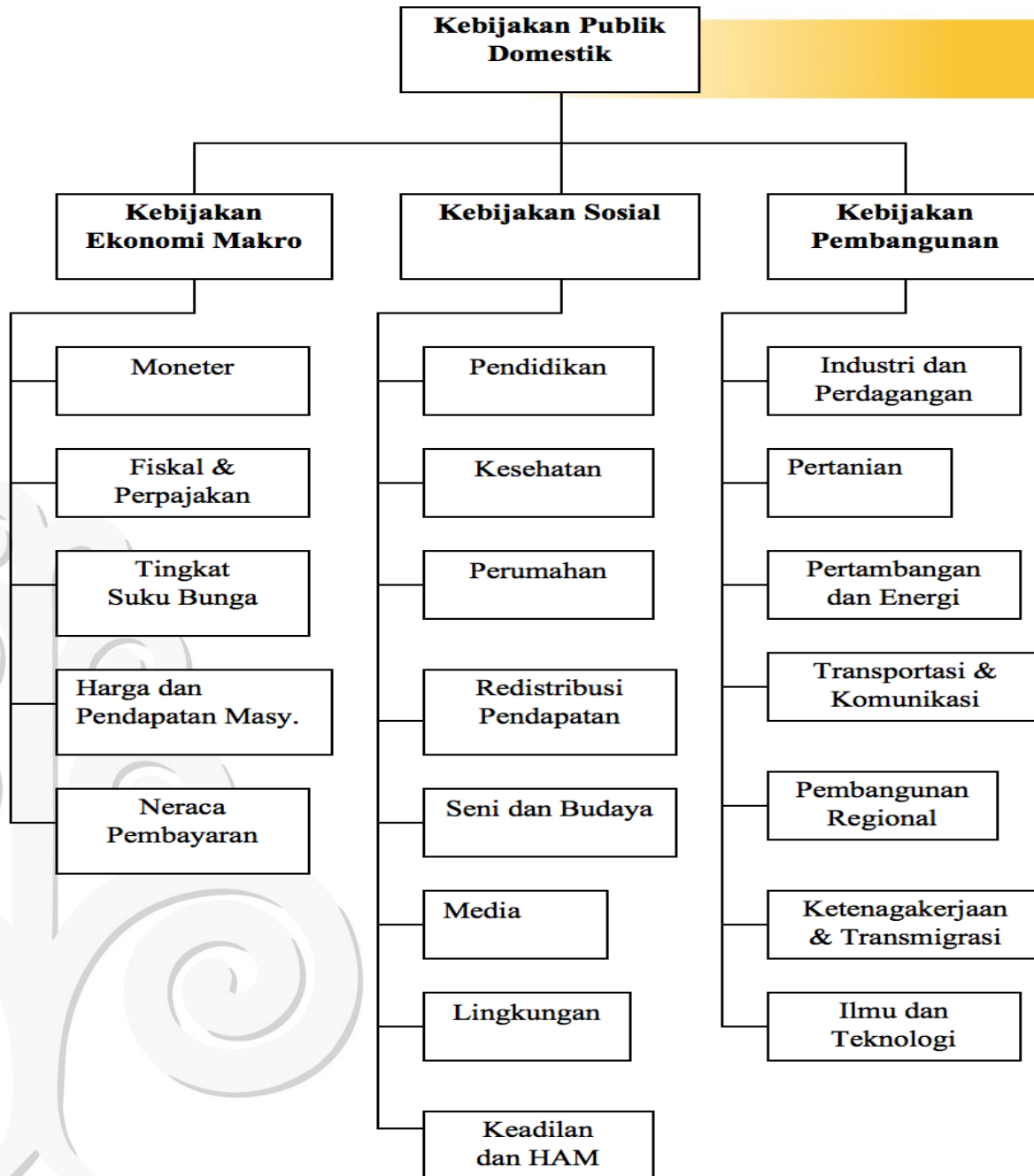


Proses Kebijakan Publik



Tantangan Analisis Kebijakan di Indonesia





Industrial Revolution



1



Mechanization
Steam engines
Water/steam power
New manufacturing
Iron production
Textile industry
Mining and metallurgy
Machine tools
Steam factories

2



Technological
Electrification
Production line
Mass production
Globalization
Engines/turbines
Broad adoption
of telegraph,
gas, water supply

3



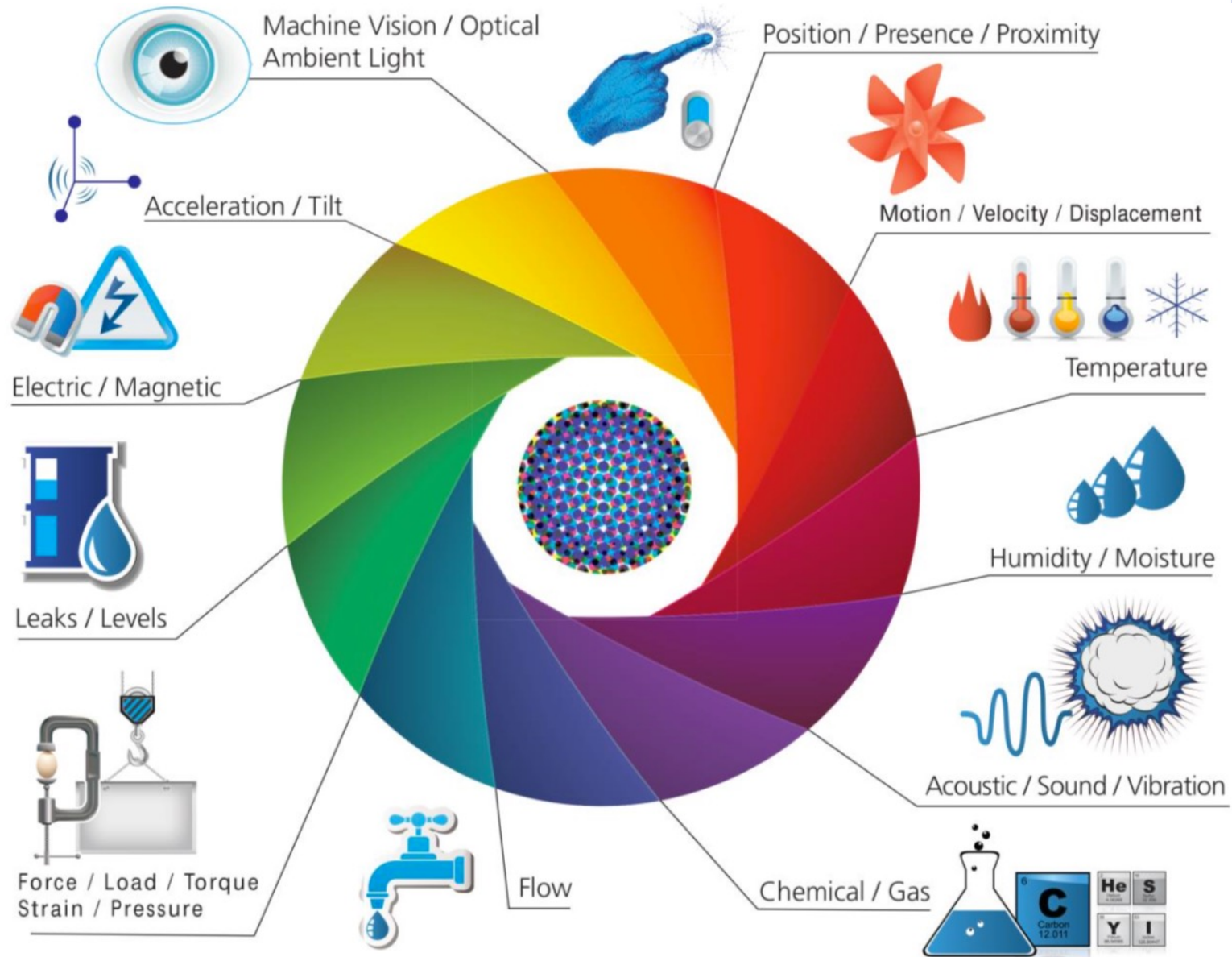
Computer /Internet
Digital manufacturing
PLC/Robotics
IT and OT
Digitization
Automation
Electronic/digital
Networks
Digital machines

4



Convergence IT /OT
Autonomous machine
Advanced robotics
Big Data/Analytics
Internet of Things
Digital ubiquity/Cloud
Smart factory
Machine learning & AI
Cyber Physical

The Internet of Things





Ubiquitous Smart Devices...

SMART THERMOSTATS

nest



Save resources and money on your heating bills by adapting to your usage patterns and turning the temperature down when you're away from home.

CONNECTED CARS

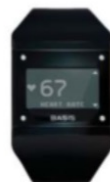
CAR 2GO



Tracked and rented using a smartphone. Car2Go also handles billing, parking and insurance automatically.

ACTIVITY TRACKERS

BASIS



Continuously capture heart rate patterns, activity levels, calorie expenditure and skin temperature on your wrist 24/7.

SMART OUTLETS

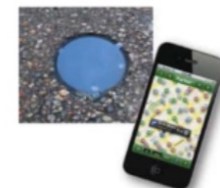
belkin



Remotely turn any device or appliance on or off. Track a device's energy usage and receive personalized notifications from your smartphone.

PARKING SENSORS

STREETLINE
CONNECTING THE REAL WORLD



Using embedded street sensors, users can identify real-time availability of parking spaces on their phone. City officials can manage and price their resources based on actual use.

Impact of automation varies by a country's income level, demographics, and industry structure

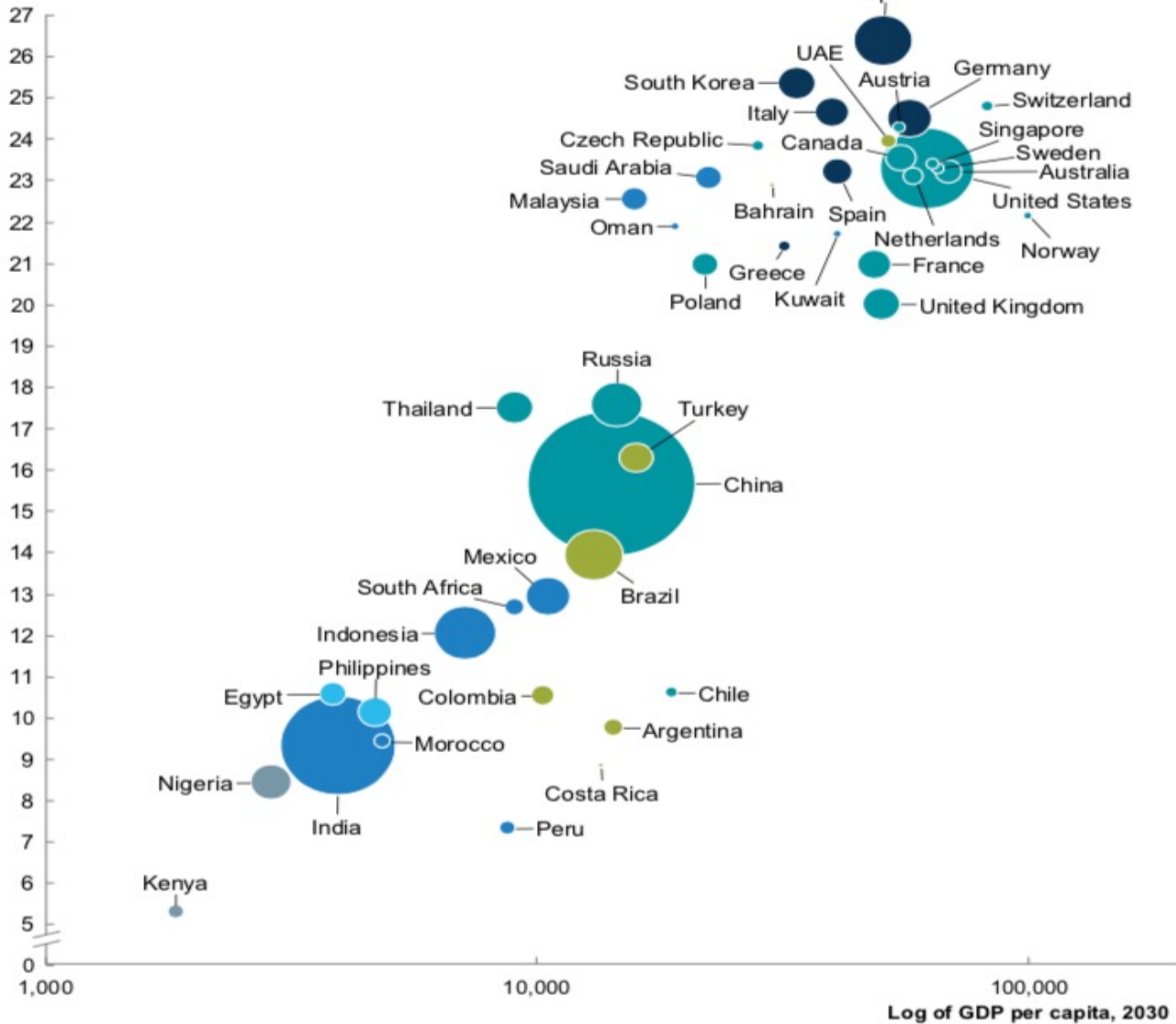
Size = FTEs potentially displaced, 2030 (million)



Color = Average age (projected), 2030



Percentage of current work activities displaced by automation, 2016-30, midpoint adoption scenario



Source:
McKinsey Global
Institute, 2017

Positives vs. Negatives



Positives impacts:

1. Education
2. Communication
3. Economy
4. Business
5. Medical Treatment
6. Transport
7. Work Efficiency

Negative impacts:

1. Ethical issues: Bio-Engineering
2. Losing jobs
3. Soc-med distraction, hoax, cyber-bullying
4. Short-living organizations
5. Cyber-crime



Normal vs The New Normal



NETFLIX

GO  JEK

skype™

 airbnb



Amazing Growth of Tech Industries



The cost of key technologies has fallen rapidly

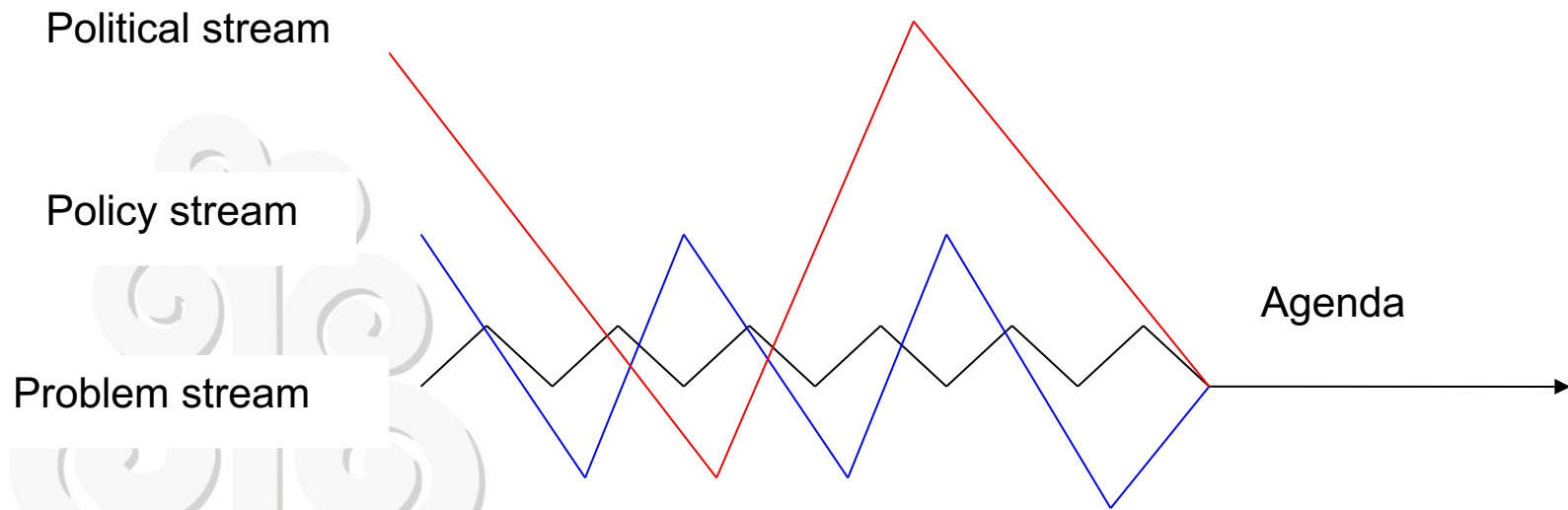


Source: World Economic Forum, 2017



AGENDA SETTING MODEL

Re: John Kingdon, 1984





Ahmed Bouazizi:

“Seorang penjual buah yang menyebabkan lengsernya rejim presiden Zainal Bin Ali di Tunisia”





Pengorbanan diri Bouazizi...



Memicu kemarahan publik kepada pemerintah diktator Bin Ali.



When all the events create multi-streams
“coupling” (Kingdon, 1983), you cannot stop it...





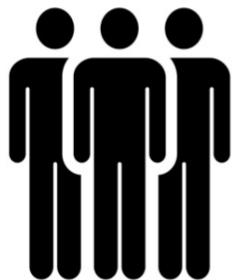
Banyak hal bisa diketahui publik...

- www.indonesialeaks.id
- <https://www.antikorupsi.org>
- <https://www.internationalbudget.org>
- #indonesianpublicservices
- <https://www.transparency.org/country/IDN>
- <https://ti.or.id>
- <http://www.indonesianparliamentwatch.com/>
- <http://www.kemitraan.or.id/>



Warga Indonesia sudah tersambung ke Internet...

TOTAL
POPULATION



268.2

MILLION

URBANISATION:

56%

MOBILE
SUBSCRIPTIONS



355.5

MILLION

vs. POPULATION:

133%

INTERNET
USERS



150.0

MILLION

PENETRATION:

56%

ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS



150.0

MILLION

PENETRATION:

56%

AVERAGE DAILY TIME
SPENT USING THE
INTERNET VIA ANY DEVICE



8H 36M

Sumber: Hootsuite, We Are Social, Januari 2019





Tantangan Literasi Digital



Penyebaran Berita Bohong

162

hoaks terkait pemilu (saja) sepanjang Agustus 2018 - 20 Februari 2019 (Kominfo, 2019)



Penyebaran Konten Pornografi

898.108

konten pornografi telah diblokir sepanjang 2010-2018 (Kominfo, 2019)



Penipuan Secara Online

3.021

konten penipuan telah diblokir sepanjang tahun 2018 (Kominfo, 2019)



Perudungan Siber (Cyberbullying)

41%-50%

remaja Indonesia pernah mengalami *cyberbullying* (UNICEF, 2016)



Radikalisme/Ekstrimisme Digital

10.451

konten radikalisme telah diblokir sepanjang tahun 2018 (Kominfo, 2019)



Konten Terkait Perjudian

71.265

konten perjudian telah diblokir sepanjang tahun 2018 (Kominfo, 2019)



Kebijakan Publik Kurang Efektif

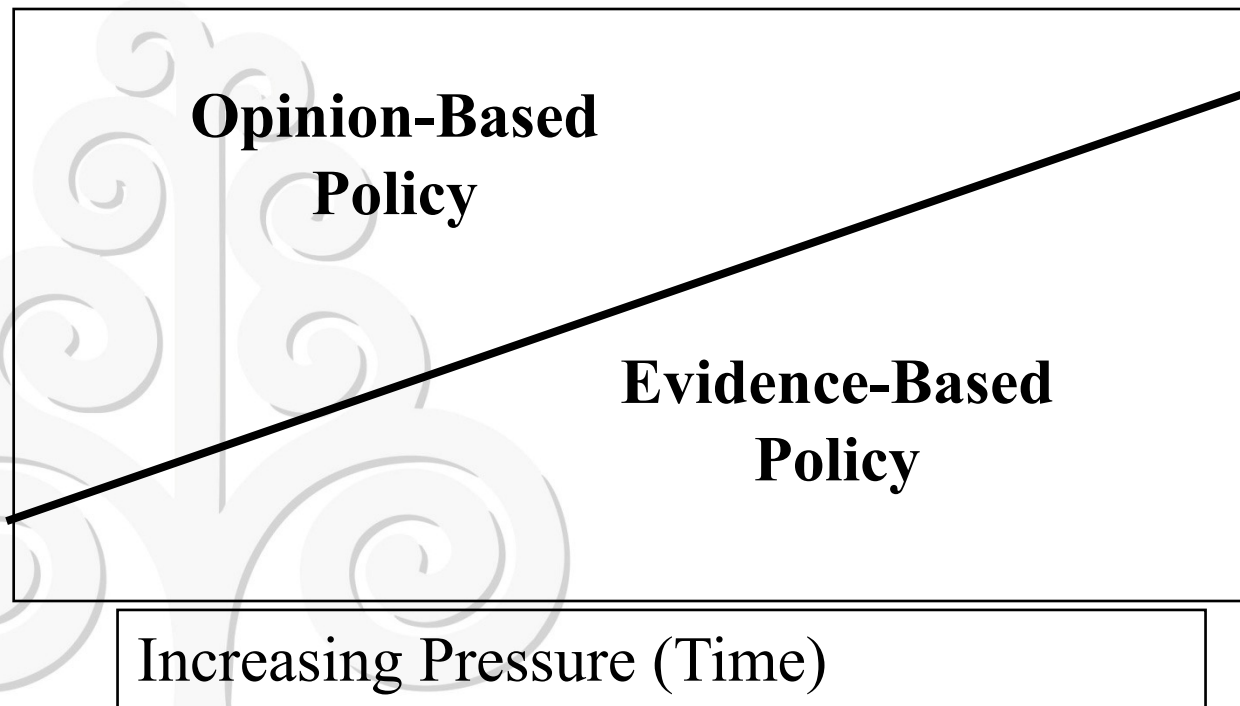


- Terdapat 807 buah yang di-*judicial review*, 127 buah yang pengujiannya dikabulkan.
- Tahun 2004-2014, dari sekitar 13.000, terdapat 3.143 buah Perda yang ditolak oleh pemerintah pusat → bertentangan dg UU No.10/2004; UU 12/2011; UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Di DIY, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat satu Perda tahun 2012 sebesar Rp 400 juta dan meningkat menjadi Rp 500 juta tahun 2013.
- Di 371 kabupaten, 103 kota, dan 33 provinsi, total biaya pembuatan perda antara Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Dengan asumsi Rp 300 juta, pemborosan anggaran tahun 2002-2011 adalah Rp 1,2 triliun.
- Anggaran pembuatan satu UU sebesar Rp 3,8 milyar (2012), meningkat menjadi Rp 5,2 milyar (2018).

What and Why Evidence-Based Policy?

“Evidence-based policy helps people make well-informed decisions about policies, programmes and projects by putting the best available evidence from research at the heart of policy development and implementation”

(Davies, P.T., 1999)



Source: Muir Gray 1997



Kasus #1: Transportasi Berbasis Aplikasi

- Kebijakan dan peraturan perundangan tidak antisipatif terhadap perkembangan teknologi.
- Koordinasi kebijakan lemah, implementasi kurang sistematis.
- Pendekatan bagi analisis kebijakan kurang komprehensif, kurang antisipatif.
- Masalah publik dalam jangka-panjang tidak terakomodasi dalam regulasi.



Enter: Go-Jek

Love-Hate relations with Government



Gagap Kebijakan Terkait Go-Jek



- Didirikan 2010 Oktober dg 20 sepeda motor; tak ada yg peduli...
- Layanan transportasi berbasis Aplikasi sejak 2015: Blue-bird & dan taksi konvensional protes keras.
- Desember 2015: Menhub dan Polri menyatakan transportasi berbasis aplikasi “ilegal” (Re:UU No.22/2009), harus dibersihkan dari jalanan.
- September 2016: Demo konsumen transportasi daring marak di banyak kota (Manado, Surabaya, Balikpapan).
- Feb 2017: MA menyatakan “Peraturan Kemenhub harus direvisi”.
- Agustus 2018: President Jokowi menghadiri peluncuran investasi Go-Jek di Vietnam.

Kemacetan lalu-lintas, masalah akut di banyak kota...



Survey: Jakartans spend 22 days a year in traffic jam, *Jakarta Post*, 1/11/2017



Transportasi Pribadi vs Umum (%)

No.	Kota	Kendaraan Pribadi	Transportasi Umum	Lainnya
1.	Jakarta, 2010	34	28	38
2.	Tokyo, 2009	12	51	37
3.	Mumbai, 2011	15	52	33
4.	Shanghai, 2011	20	33	47
5.	Beijing, 2011	21	26	53
6.	New York, 2009	29	55	16
7.	New Delhi, 2011	19	48	33
8.	Seoul, 2010	26	63	11

Source: www.globalindonesianvoices.com, 19/12/2012

Multi-Kriteria dalam Kebijakan Transportasi-Aplikasi



No.	Kriteria	Keterangan
1.	Teknis	Sudah digunakan oleh warga, pemerintah tidak mungkin sekadar melarang. (Th 2020, Go-Jek 1,7 juta mitra di 50 kota. Unduhan aplikasi: 16 juta) Pemakai ponsel pintar dan akses layanan daring semakin luas.
2.	Ekonomis	Menciptakan peluang kerja baru. Pertumbuhan PDB didukung investasi teknologi digital. Sharing economy dan peer-to-peer businesses adalah model bisnis yg sekarang berkembang.
3.	Legal	Konsep kemitraan tidak mendukung hubungan industrial yg setara. Kerangka perundangan terlambat jika dibanding pesatnya perubahan model dan aliansi bisnis. Arah kebijakan harus cerdas dan antisipatif terhadap aplikasi teknologi.
4.	Sosial	Konsumen menyukai aplikasi dan layanan yg paling mudah. Opini publik cepat berubah karena info media sosial; pemerintah harus lebih responsif dalam banyak hal. Pemerintah harus melindungi pekerja yg terdisrupsi, bisnis baru harus inklusif.
5.	Substantif	Layanan transport berbasis aplikasi tidak memecahkan masalah kemacetan lalin. Pemerintah harus mencegah monopoli dan menciptakan model bisnis yang adil dan sehat dalam transportasi.



What is coming next?



Waymo Chrysler Pacifica:

Kendaraan nir-awak yg sudah diuji-cobakan.

1. Apa regulasi yg harus disiapkan?
2. Bagaimana mengontrol sistem operasinya?
3. Mis: Bagaimana polisi mengenakan “Tilang” jika ada pelanggaran?
4. Bagaimana memastikan kendaraan tidak digunakan untuk kejahatan?



Kasus #2: Penanggulangan Covid-19

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan ketidakpastian global.
2. Strategi dan paradigma yang kurang jelas: *Social-Distancing* (Hensley, 2020) vs. *Herd Immunity* (Gordis, 2013).
3. Arah pokok kebijakan kurang jelas.
4. Masalah kelincahan (*agility*) dalam membuat mekanisme layanan publik.

Kebijakan Yang Sulit Diikuti Arahnya

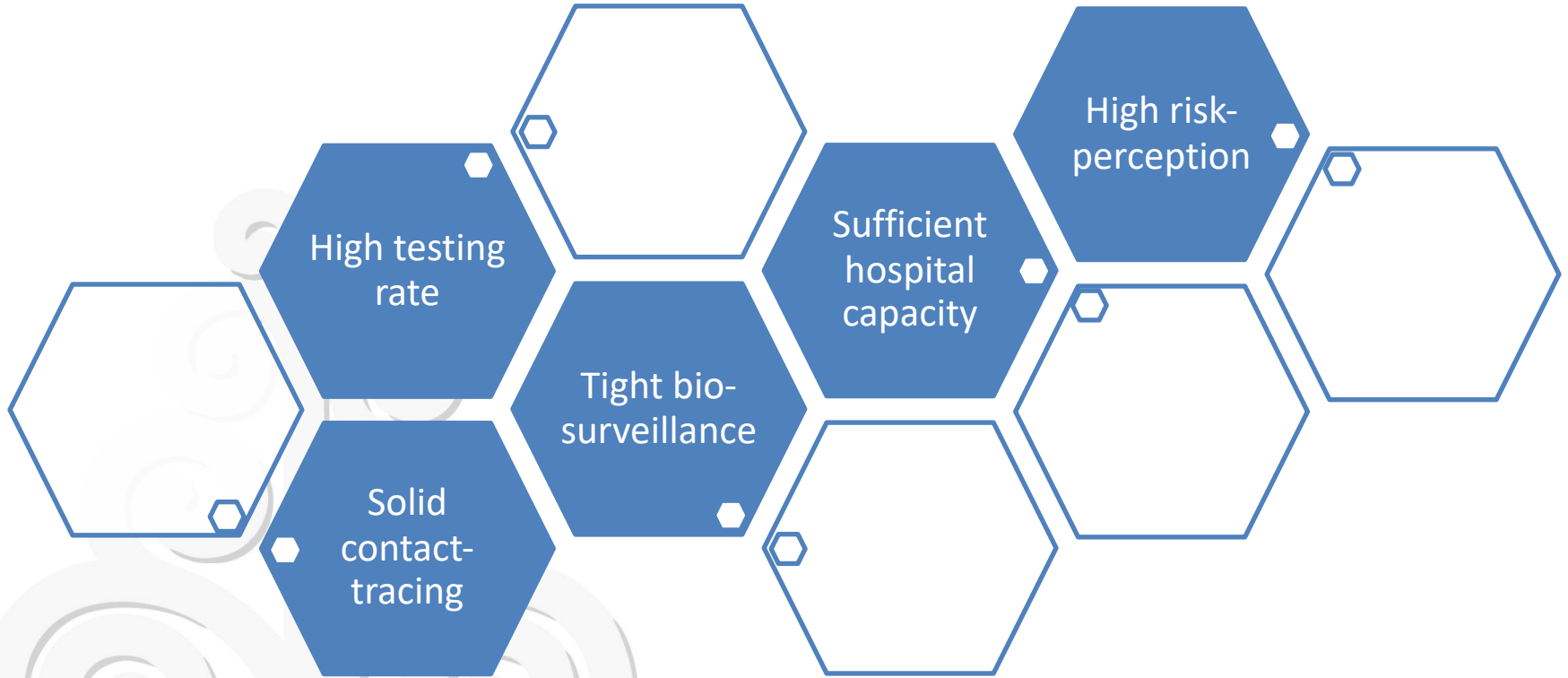


1. Pada awalnya: tidak ada pembatasan sosial.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB): Konflik Pusat vs Daerah
3. New normalcy: penekanan pada protocol kesehatan (Adaptasi Kebiasaan Baru, AKB)
4. Penerapan *partial lockdown* di zona merah : PSBB Regional.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"If it is deemed necessary, the restriction of community activities can be carried out on a micro-scale, in a small scope, be it on a village scale, or neighborhood only. Do not carry out a total lockdown of the entire city if there's only one person from one neighborhood who is exposed to coronavirus", said Jokowi when opening an event broadcast online on the Presidential Secretariat YouTube channel, Thursday, 11 February.

"If only one person from one neighborhood is exposed to the virus but keep implementing a total lockdown, what's the use?", he added.

New-Normal Basic Imperatives



Bukti faktual terkait Covid-19 sangat problematis...



1. Tingkat pengujian positif Covid-19 masih terlalu rendah. Kurang dari 1 orang per 1 juta penduduk (bandingkan Denmark: 80 per sejuta penduduk).
2. Bio-surveillance (3T, terutama testing dan tracing) kurang dilaksanakan secara sistematis: pelacakan atas kasus baru, isolasi mandiri, protokol kesehatan di tempat umum (3M).
3. Ada kemungkinan besar *under-reporting* karena dua alasan: 1) kurangnya data akurat karena lemahnya bio-surveillance, b) Stigma negatif terhadap identifikasi Covid-positif.

(Hadisoemarto, P., *Tempo*, 1-7 Juni 2020)



Menjaga Data Pemerintah

Small Data

- Urusan rutin (emails, intranet, accounts)
- Pajak, bencana, aset & infrastruktur
- Materi pelatihan, info pemasaran
- Semua informasi terkait program pemerintah.

Big Data

- Identitas individual (nama, email, telp, alamat, IP, dll)
- Pegawai birokrasi publik (kualitas, kinerja, gaji & tunjangan, strategi PSM, jalur karir, dll)

Strategic Data

- Pertahanan dan keamanan nasional
- Intelijen
- Penegakan hukum, investigasi, pencegahan terorisme
- Perlindungan infrastruktur (kerentanan aset)
- Identitas primer, otentisitas, akses ke fasilitas pemerintah, penjagaan perbatasan, dll.



Tugas Polri

- Pasal 13 UU No. 2/2002 ttg Polri:

Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Visi Kapolri: Presisi



“Prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan”.

1. Penataan Kelembagaan.
2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi
3. Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0.
4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.
5. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
6. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
7. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.
8. Pemulihan Ekonomi Nasional.
9. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.
10. Penguatan Penanganan Konflik Sosial
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.
12. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi.
13. Pemantapan Komunikasi Publik.
14. Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan.
15. Penguatan Fungsi Pengawasan.
16. Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (*Public Complaint*).

Penataan Kelembagaan



Peningkatan kinerja dan performa melalui penataan regulasi dan perubahan kultur Polri:

1. Penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan.
2. Penguatan struktur organisasi Polri.
3. Peningkatan penghayatan kultur baru: tegas, tetapi humanis dan melayani.



Police 4.0

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri menuju era Police 4.0.
2. Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja.
3. Perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri.
4. Pengelolaan SDM unggul yang humanis.
5. Peningkatan kesejahteraan pegawai Polri.



“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change” (**Charles Darwin**)

“We only want to change if we believe it will improve our lives”
(**Barack Obama**)



UNIVERSITAS GADJAH MADA

THANK YOU

